

Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Desa Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Klaten Tahun 2019

Novita Ambarsari¹, Andy Dwi Bayu Bawono²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: b200170293@student.ums.ac.id ; andy.bawono@ums.ac.id

Abstract. *This research aims to determine the factors that influence Village Farming and Livestock Expenditures in Klaten Regency, Central Java. The factors were influence Village Original Income, Village Funds, Village Fund Allocation, Tax Revenue Sharing and Retribution, and the Number of Rice Fields. By using purposive sampling method, the samples in this study were taken from all villages budget report in 2019 fiscal year. The data from 258 village samples were processed by SPSS analytical tool by using multiple linear regression testing. The results in this study indicate that Village Original Income, Village Funds, Village Fund Allocation, and Number of Rice Fields have no effect on Village Farming and Livestock Village Expenditure. while Tax and Retribution Revenue Sharing has a significant negative influence on Village Agriculture and Livestock Expenditures.*

Keywords: *APBDes; Village Financial Management; Agricultural and Livestock Village Expenditures.*

Abstrak. *Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Desa Pertanian dan Peternakan diantaranya Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Jumlah Sawah di Kabupaten Klaten tahun 2019. Penelitian ini mengambil sampel di seluruh desa Kabupaten Klaten dengan teknik purposive sampling, sehingga mengumpulkan data diolah 258 sampel desa. Penelitian ini menggunakan pengujian regresi linear berganda dengan alat analisis SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Jumlah Sawah tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan, sedangkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan.*

Kata Kunci: *APBDes; Pengelolaan Keuangan Desa; Belanja Desa Pertanian dan Peternakan.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dipenuhi oleh hamparan lahan pertanian sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris atau mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pertumbuhan sektor pertanian menjadi pelopor pertumbuhan ekonomi dan menjadi sumber pendapatan yang substansial bagi rumah tangga desa (Tola, 2016). Di Indonesia, masyarakat desa dapat dikatakan sebagai petani termasuk mereka yang mengantungkan hidupnya di bidang peternakan. Secara garis besar, pertanian dan peternakan memiliki urusan yang sama yaitu

mendorong pembangunan masyarakat desa melalui usaha-usaha pemberdayaan masyarakat.

Di dalam kerangka Desentralisasi, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan mendistribusikan belanja secara proposional dengan pendapatannya, atau dapat diartikan Pemerintah Daerah dapat mengeksplorasi seluruh potensi sumber daya yang ada pada suatu wilayah (Purbasari & Bawono, 2017). Untuk level desa guna mendukung kemandirian desa maka pemanfaatan Dana Desa (DD) dan bantuan provinsi yang termasuk bagian dari dana transfer Pemerintah

Pusat, maupun yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dioptimalkan untuk mewujudkan kemandirian desa dalam memaksimalkan potensi desa. Terciptanya desa yang mandiri termasuk dari tujuan pembangunan ekonomi negara melalui desa yang berdaya.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan, 10 kelurahan dan 391 desa. Sektor pertanian dan peternakan masih menjadi rantai terlemah dalam pembangunan ekonomi melalui usaha pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini tercermin dari belum tercapainya kesejahteraan hidup petani dan produktivitas pertanian yang masih rendah. Permasalahan klasik yang menghambat laju keberhasilan usaha pertanian adalah terbatasnya pembiayaan yang digunakan untuk mendukung usaha pemberdayaan masyarakat khususnya dalam sektor pertanian dan peternakan. Selain itu pengalihan fungsi lahan sawah untuk pembangunan perindustrian dan permukiman menjadi tantangan dan tekanan baru dalam ranah gerak sektor pertanian.

Menurut Haryanto dalam Jefri (2018), teori agensi adalah teori tentang hubungan *principal* dan *agent*, yang berasal dari teori organisasi, teori ekonomi, sosiologi, dan teori keputusan. Apabila diimplementasikan dalam hubungan sektor publik, masyarakat bertindak sebagai *principal* sementara pemerintah adalah *agent*. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menyelenggarakan kewenangan dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang cita-citakan. Pemerintah sebagai wakil kepentingan rakyat berkontribusi secara positif dalam mengemban amanah yang diberikan masyarakat dan berkewajiban untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban yang transparan, dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan.

Menurut Hernandez dalam Jefri (2018) mendefinisikan, *stewardship* sebagai sikap atau perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok diatas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang. Perwujudan kesejahteraan masyarakat dinilai lebih urgensi dalam tujuan penganggaran sektor publik, sehingga perlu keselarasan dalam menetapkan tujuan agar tidak ada intervensi antar kepentingan yang menghambat proses pelaksanaan anggaran. Pemerintah akan bertindak secara optimal dalam mencapai

kesejahteraan masyarakat.

Permendagri 20 Tahun 2018 menjabarkan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi unsur: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dasar pengelolaan keuangan desa harus mencakup asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari komponen utama yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) digunakan untuk mendukung pembangunan desa dengan menetapkan rencana kegiatan/program beserta rincian pembiayaannya.

Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Desa pasal 15, Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Belanja desa diklasifikasikan dalam lima bidang yang terdiri dari sub-sub bidang. Belanja desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan dan pembangunan desa.

Dengan diberlakukan undang-undang desa, peneliti tertarik untuk meneliti pemberdayaan masyarakat desa khususnya pada bidang pertanian dan peternakan, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Jumlah Sawah memiliki pengaruh terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian data sekunder, dengan memperoleh sumber data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, dan Balai Penyuluhan Pertanian. Sampel yang dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini

adalah 258 desa, diperoleh dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Belanja Desa Pertanian dan Peternakan dengan variabel independen berupa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Jumlah Sawah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah analisis regresi berganda yang

digunakan dalam penelitian:

$$BDPP = a + \beta_1 PADesa + \beta_2 DD + \beta_3 ADD + \beta_4 BHPR + \beta_5 JS + e$$

Keterangan: **BDPP**=Belanja Desa Pertanian dan Peternakan, **PADesa**=Pendapatan Asli Desa, **DD**=Dana Desa, **ADD**=Alokasi Dana Desa, **BHPR**=Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, **JS**=Jumlah Sawah, **a**=konstanta, **β** =koefisien regresi masing-masing variabel, **e**=error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-137449559	237371964,4	-0,579	0,563
PADesa	0,003	0,036	0,077	0,939
DD	-0,100	0,059	-1,706	0,089
ADD	0,906	0,817	1,109	0,268
BHPR	-1,418	0,516	-2,745	0,006
JS	316827,061	178447,297	1,775	0,077

Sumber: data diolah, 2021

Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan

Pendapatan Asli Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan, dengan melihat nilai signifikansi Pendapatan Asli Desa yakni sebesar $0,939 > 0,05$. Sampai saat ini Pendapatan Asli Desa masih difokuskan untuk membiayai pembangunan fisik khususnya prasarana dan infrastruktur perkantoran desa, sehingga Pendapatan Asli Desa tidak banyak berkontribusi terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian (Rokhmawan, & Wahyono, 2018), bahwa Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian. Dan penelitian (Murti, & Zulfikar, 2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh pada Belanja Desa Bidang Pertanian.

Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan

Dana Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan, dengan melihat nilai signifikansi Dana Desa yakni sebesar $0,089 > 0,05$. Dana Desa merupakan dana yang secara rata tersebar

di seluruh Desa. Setiap desa memiliki varian Dana Desa yang berbeda-beda. Perbedaan varian Dana Desa tidak sejalan dengan varian yang ada dalam Belanja Desa Pertanian dan Peternakan, sehingga besar kecilnya Dana Desa tidak mempengaruhi terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian (Ramadhan, & Adi, 2019) bahwa Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dan penelitian (Purbasari, Wardana, & Pangestu, 2018) bahwa Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan

Alokasi Dana Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan, dengan melihat nilai signifikansi Alokasi Dana Desa yakni sebesar $0,268 > 0,05$. Alokasi Dana Desa diarahkan dan difokuskan untuk menyelenggarakan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa. Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk tambahan operasional, sehingga rata-rata Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh pada Belanja Desa Pertanian

dan Peternakan. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian (Purbasari, Wardana, & Pangestu, 2018) bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian. Penelitian (Rokhmawan, & Wahyono, 2018), juga menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.

Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan, dengan melihat nilai signifikansi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yakni sebesar $0,006 < 0,05$. Semakin tinggi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi maka semakin rendah Belanja Desa Pertanian dan Peternakan. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ditentukan oleh kontribusi desa dalam memberikan alokasi terhadap pajak dan retribusi. Pada umumnya desa yang berkontribusi dalam memberikan alokasi pajak dan retribusi adalah desa yang bersifat urban/perkotaan. Dalam kata lain desa urban/perkotaan memiliki jumlah sawah yang sedikit, sehingga semakin tinggi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi maka pengalokasian untuk Belanja Desa Pertanian dan Peternakan semakin kecil. Sedangkan untuk desa yang bersifat rural memaksimalkan penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Belanja Desa Pertanian dan Peternakan, maka Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan karena mayoritas desa di Kabupaten Klaten bersifat rural. Hal ini searah dengan penelitian yang dilakukan (Sari, & Asyik, 2017), bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil yang sama ditunjukkan pada penelitian (Purbasari, Wardana, & Pangestu, 2018) bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian. Dan penelitian (Ramadhan, & Adi, 2019) bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, salah satunya terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan.

Pengaruh Jumlah Sawah terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan

Jumlah sawah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Pertanian

dan Peternakan, dengan melihat nilai signifikansi Jumlah sawah yakni sebesar $0,077 > 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalokasikan Belanja Desa Pertanian dan Peternakan tidak berdasarkan jumlah sawah yang ada, melainkan diprioritaskan untuk kebutuhan masing-masing Desa. Perbedaan sistem pengairan juga menjadi dasar penentuan besar kecilnya pengalokasian Belanja Desa Pertanian dan Peternakan. Maka penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Jumlah Sawah tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan. Hal ini searah dengan penelitian (Murti, & Zulfikar, 2018) yang menyatakan bahwa jumlah sawah tidak berpengaruh pada Belanja Desa Bidang Pertanian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan melihat hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Desa, Dan Desa, Alokasi Dan Desa, dan Jumlah Sawah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan, sedangkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Desa Pertanian dan Peternakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diajukan saran kepada peneliti selanjutnya untuk menambah sampel dari kabupaten lain, menggunakan data penelitian lebih dari satu tahun anggaran, mengganti/menambah variabel. Untuk Instansi Pemerintah diharapkan melakukan konsistensi/standarisasi data.

REFERENSI

- Eko, Sutoro *et al.* 2016. Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaruan Desa.
- Jefri, Riny. 2018. "Teori Stewardship Dan Good Governance." *Jurnal Riset* 4(003): 14–28. Universitas Negeri Makassar
- Jiwangga, Alfattah Akbar & Agus Prastyawan. 2016. "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) Di Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik."
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.: CV. Andi Offset
- Murti, Reina Shafira & Zulfikar. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) Dan jumlah Sawah Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang

- Pertanian Tahun 2017 (Studi Empiris Di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri).” *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Purbasari, Heppy & Andy Dwi Bayu Bawono. 2017. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kinerja Pemerintahan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan”.
- Purbasari, Heppy, Bramudya Wisnu Wardana, & Ilham Adhi Pangestu. 2018. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum Dan Pertanian (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo).” *The 7th University Research Colloquium 2018 Stikes PKU Muhammadiyah Surakarta*: 281–87.
- Ramadhan, Taufiq Bayu Aji & Suyatmin Waskito Adi. 2019. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Empiris: Desa-Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2017).” *Naskah Publikasi* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rokhmawan, Dwi Arif & Wahyono. 2018. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017 (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sragen).” *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sari, Erlina Tiara Intan, & Nur Fadrih Asyik. 2017. “Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Timur).” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(5): 1977–94.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tola, Damianus. 2016. “Pembangunan Sektor Pertanian Sebagai Basis Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan (Kajian Kepustakaan).” *Jurnal Pendidikan Ekonomi*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa